

ABSTRAK

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN UNI EROPA TERHADAP PERDAGANGAN SENJATA API ILEGAL DI EROPA, 2019– 2023

Oleh

Jonathan Samudera Hasiholan

Tingginya kasus perdagangan senjata api ilegal merupakan ancaman multidimensi di kawasan Eropa terutama dalam hal keamanan yang didorong oleh tingginya kasus kejahatan transnasional terorganisir. Uni Eropa sebagai institusi/organisasi yang memiliki legitimasi terkuat di kawasan Eropa merespons dengan suatu kebijakan yang meliputi tindakan legal, operasional, serta kerja sama dengan negara-negara mitra yang berbatasan langsung dengan anggota Uni Eropa.

Penelitian ini menggunakan konsep enam fase proses pengambilan keputusan (*Decision Making*) oleh Morin & Paquin, meliputi *framing, agenda setting, options, decision, implementation*, dan *evaluation* serta konsep kerja sama internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang didukung oleh data sekunder dari berbagai laporan resmi dan publikasi ilmiah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Uni Eropa sebagai aktor supranasional dan *intergovernmental* secara aktif membingkai perdagangan senjata api ilegal sebagai ancaman yang serius. Dengan inisiatif *Action Plan on Firearms Trafficking* (2015–2019 dan 2020–2025) dan EMPACT (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats*) dari negara anggota, pendekatan legislatif melalui *Firearms Directive*, dan upaya kerja sama internasional dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional yang selanjutnya kebijakan diterapkan melalui transposisi direktif oleh negara anggota dan partisipasi aktif dalam operasi gabungan. Namun, meskipun terdapat upaya maksimal dari Uni Eropa dan kerja sama dari negara anggota, evaluasi menunjukkan adanya tantangan signifikan terutama dalam inkonsistensi transposisi *Firearms Directive* yang berdampak pada efektivitas operasional.

Kata Kunci: Uni Eropa, Kebijakan, Perdagangan Senjata Api Ilegal, *Decision Making*, Kerja Sama Internasional.

ABSTRACT

THE DECISION MAKING PROCESS OF EUROPEAN UNION'S POLICY ON ILLICIT FIREARMS TRAFFICKING IN EUROPE, 2019–2023

By

Jonathan Samudera Hasiholan

The high incidence of illicit firearms trafficking poses a multidimensional threat in Europe, particularly in terms of security, driven by the rise of transnational organized crime. As the institution with the strongest legitimacy in the region, the European Union has responded with a policy framework that includes legal measures, operational actions, and cooperation with partner countries bordering EU member states. This study employs the six-phase decision-making process model by Morin and Paquin, comprising framing, agenda setting, options, decision, implementation, and evaluation, alongside the concept of international cooperation. The research employs a qualitative approach, utilizing descriptive analysis and secondary data sourced from official reports and scholarly publications. The findings reveal that the European Union, as both a supranational and intergovernmental actor, actively frames illicit firearms trafficking as a serious threat. Through initiatives such as the Action Plan on Firearms Trafficking (2015–2019 and 2020–2025), the EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) initiative among member states, legislative efforts through the Firearms Directive, and international cooperation with partner countries and global organizations, the EU has established a comprehensive policy response. This policy is implemented through the transposition of directives by member states and active participation in joint operations. However, despite the EU's extensive efforts and cooperation among its members, the evaluation phase highlights significant challenges, particularly the inconsistent transposition of the Firearms Directive, which affects overall operational effectiveness.

Keywords: European Union, Policy, Illicit Firearms Trafficking, Decision Making, International Cooperation.